



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*); Faksimilie: (021) 85906467; e-mail: *investigasi@bpkp.go.id*

Nomor : LKIN- 10 /D5/01/ 2018 31 Juli 2018
Lampiran : Satu halaman
Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi
Triwulan II Tahun 2018

Yth. Kepala BPKP
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan laporan evaluasi kinerja Deputi Bidang Investigasi triwulan II tahun 2018. Capaian kinerja triwulan II tahun 2018 merupakan perbandingan realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja triwulan II tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Sasaran Program

a. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

- 1) IKU 1.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) pada sidang di pengadilan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 24,72% atau mencapai 49,44% dari target tahun 2018 sebesar 50,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan yaitu 267 laporan dibandingkan 1.080 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pemberian keterangan ahli, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE) yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 2) IKU 1.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah tingkat pemanfaatan hasil audit investigatif oleh APH. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 54,84% atau mencapai 76,16% dari target tahun 2018 sebesar 72,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 17 laporan dibandingkan 31 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 3) IKU 1.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang dibandingkan dengan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 23,08% atau mencapai 35,50% dari target tahun 2018 sebesar 65,00%. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 3 laporan dibandingkan 13 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 4) IKU 1.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit penyesuaian harga oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa untuk pengambilan keputusan penyesuaian harga. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 36,36% atau mencapai 48,48% dari target tahun 2018 sebesar 75,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan yaitu 4 laporan dibandingkan 11 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit penyesuaian harga yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

5) IKU 1.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit klaim oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk pengambilan keputusan penyelesaian klaim. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 50,00% atau mencapai 66,67% dari target tahun 2018 sebesar 75,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk pengambilan keputusan klaim dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan yaitu 2 laporan dibandingkan 4 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit klaim yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

b. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

IKU 2.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan adalah tingkat pemanfaatan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran program/kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah Laporan Hasil EHKP yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 33,33% atau mencapai 44,44% dari target tahun 2018 sebesar 75,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah laporan EHKP yang diterbitkan yaitu 3 laporan dibandingkan 9 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

1) IKU 3.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP.

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) adalah tingkat penyelesaian penugasan *Fraud Control Plan* (FCP) termasuk *Fraud Risk Assessment* (FRA) baik atas permintaan K/L/P/K dan inisiatif sendiri pada salah satu dari tahapan:

- a. Sosialisasi
- b. *Diagnostic Assessment*
- c. Bimbingan Teknis Implementasi
- d. Evaluasi
- e. Monitoring

yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP dilaksanakan (Sosialisasi + *Diagnostic Assessment* + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 62,50% atau mencapai 120,19% dari target tahun 2018 sebesar 52,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP yang dilaksanakan yaitu 5 laporan dibandingkan 8 penugasan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan FCP termasuk FRA yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

2) IKU 3.2. Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard* dan *soft competency*) di bidang pencegahan.

Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard* dan *soft competence*) di bidang pencegahan, yaitu kompetensi untuk melakukan kegiatan *Fraud Control Plan* (FCP), *Fraud Risk Assesment* (FRA), Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), dan Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK). Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang sudah pernah (berpengalaman) melakukan FCP/FRA/MPAK/PBOAK kepada K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 66,17% atau mencapai 106,73% dari target tahun 2018 sebesar 62,00%. Realisasi kinerja dihitung jumlah auditor yang sudah pernah (berpengalaman) melakukan FCP/FRA/MPAK/PBOAK kepada K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor yaitu 358 auditor dibandingkan 541 auditor.

d. Meningkatkan kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

IKU 4.1. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat adalah rasio K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi tiga unsur kriteria yaitu:

- a. Mempunyai Daftar Risiko *Fraud* yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KomPAK;
- b. Mempunyai rencana penanganan risiko *fraud* yang dibahas bersama dengan anggota KomPAK;
- c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing* namun menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*.

dibandingkan dengan KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018 belum ada realisasi untuk IKU Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

e. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian

IKU 5.1. Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian.

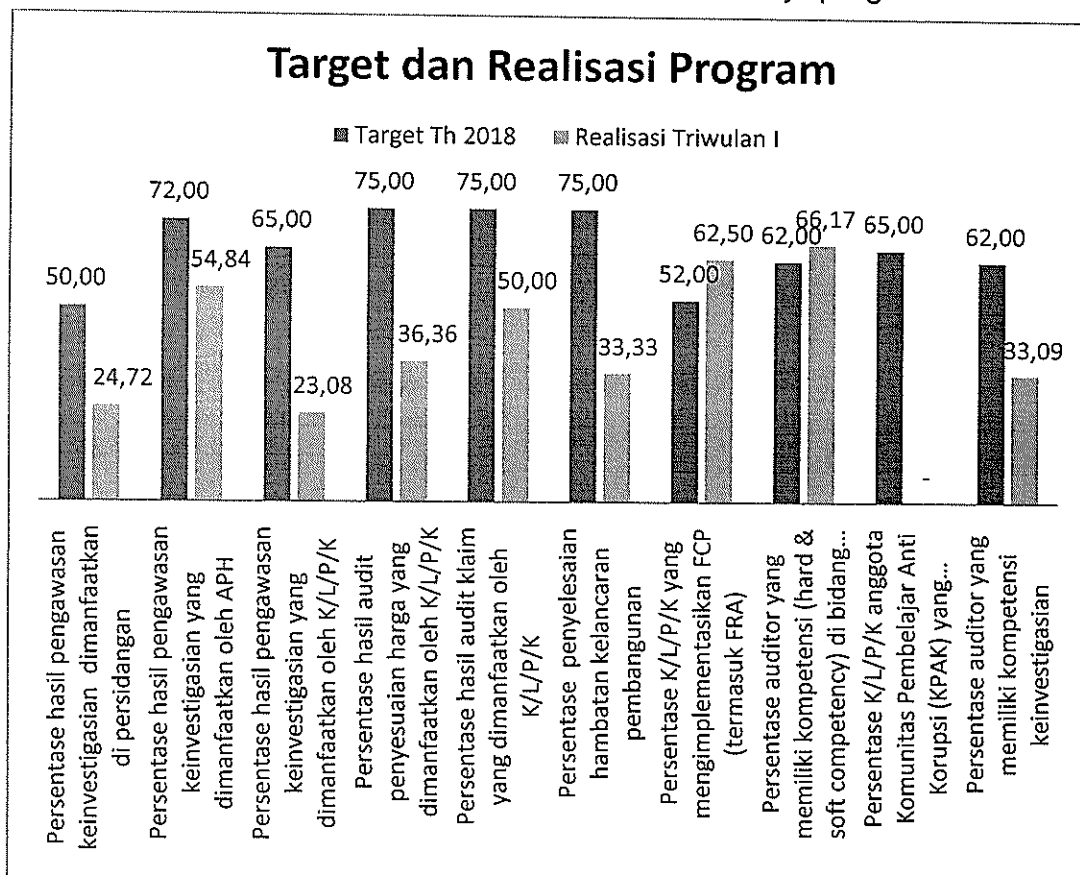
Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor investigatif meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang:

- 1) Hukum
- 2) Keuangan
- 3) Audit dan Akuntansi
- 4) Ekonomi
- 5) Penyelidikan
- 6) Komputer
- 7) Investigasi
- 8) Manajemen

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat pada tahun 2018.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2018 sebesar 33,09% atau mencapai 53,37% dari target tahun 2018 sebesar 62,00%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat di atas dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat yaitu 179 auditor dibandingkan 541 auditor.

Grafik 1: Target dan realisasi indikator kinerja program



B. Permasalahan dan Rencana Tindak

Dari grafik 1 terlihat sebanyak 6 (enam) indikator kinerja yang belum mencapai target proporsional tahun 2018 sebesar 50% yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan.
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
3. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
4. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
5. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.
6. Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian.

Rendahnya capaian pada 6 (enam) indikator kinerja tersebut disebabkan antara lain laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diserahkan kepada APH belum dilimpahkan ke pengadilan, laporan hasil audit investigatif belum ditindaklanjuti oleh K/L/P/K, hasil audit penyesuaian harga dan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang belum ditindaklanjuti oleh K/L/P/K dan kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran Deputi Bidang Investigasi tahun 2018 sebesar Rp6.094.000.000,00. Pada triwulan II tahun 2018 telah terealisasi anggaran sebesar Rp2.094.971.042,00 atau mencapai 34,38% dari anggaran dengan rincian sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Deputi Bidang Investigasi
Triwulan II Tahun 2018

| Pengawasan/ Non Pengawasan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Penyerapan Dana (%) |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Pengawasan | 5.094.000.000 | 1.484.002.033 | 29,13 |
| Non Pengawasan | 1.000.000.000 | 610.969.009 | 61,10 |
| Jumlah | 6.094.000.000 | 2.094.971.042 | 34,38 |

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Deputi,



Iswan Elmi

NIP 19600127 198102 1 001

Realisasi *Outcome* Deputi Bidang Investigasi
s.d. Triwulan II Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2018 | Realisasi s.d Trw. Ini | Capaian Tahun 2018 (%) |
|-----|--|--------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=6/4 |
| 1 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan | % | 50,00 | 24,72 | 49,44% |
| 2 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH | % | 72,00 | 54,84 | 76,16% |
| 3 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | 65,00 | 23,08 | 35,50% |
| 4 | Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | 75,00 | 36,36 | 48,48% |
| 5 | Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | 75,00 | 50,00 | 66,67% |
| 6 | Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan | % | 75,00 | 33,33 | 44,44% |
| 7 | Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) | % | 52,00 | 62,50 | 120,19% |
| 8 | Persentase auditor yang memiliki kompetensi (<i>hard & soft competency</i>) di bidang pencegahan | % | 62,00 | 66,17 | 106,73% |
| 9 | Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat | % | 65,00 | - | 0,00% |
| 10 | Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian | % | 62,00 | 33,09 | 53,37% |